

Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Opini Audit

Muhammad Haikal Firdaus S.Tr.Ak

Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Indonesia

Penulis Korespondensi

Muhammad Haikal Firdaus S.Tr.A

Email: haikalfirdaus39@gmail.com

Article Info

Article History :

Received 06 Jan - 2023

Accepted 28 Feb - 2023

Available Online

14 Maret - 2023

Abstract

This study aims to determine the effect of local government characteristics on audit opinions. The samples in this study are 16 provinces in Indonesia. The data collection technique used purposive sampling with LKPD data for 2008-2018. This study used the binomial logistic regression data analysis method assisted with SPSS software. Based on the research results, it is known that the size of the area, the level of dependency of the local government, the level of wealth of the local government, and the level of local government spending have a positive and significant effect on the audit opinion. Simultaneous tests show that the variables Size of the Region, Level of Dependence of Local Government, Level of Wealth of Local Government, and Level of Local Government Expenditure together have an effect on Audit Opinion. The Nagelkerke R2 value is 0.305, which means that the Local Government Characteristics variables consisting of Regional Size, Level of Dependence of Local Government, Level of Wealth of Local Government, and Level of Local Government Expenditure can be explained by independent variables, namely audit opinion of 30.5% while the remaining 69.5% is explained by other variables outside the research.

Keyword : characteristics of local government, size of area, level of dependence of local government, level of wealth of local government, level of local government spending, audit opinion.

1. PENDAHULUAN

Bedasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan otonomi daerah, yang mana daerah otonomi diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah Indonesia berharap dengan adanya penerapan otonomi daerah ini maka tercipta daerah yang mandiri dan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas serta meningkatkan akuntabilitas hingga mencapai *good government*. Pemerintah daerah yang memiliki potensi didaerahnya dapat mengambil suatu keputusan secara langsung dalam mengelola potensi yang ada guna

memajukan dan mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut. Dengan adanya otonomi daerah ini memicu daerah-daerah untuk bersaing guna membuktikan kemampuan dalam melaksanakan kewenangan untuk membangun daerahnya masing-masing.

Oleh sebab itu, BPK selaku badan yang melakukan pemeriksaan melalui proses audit menjadi sorotan dan menuai berbagai kritik, karena beberapa instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah dan juga lembaga dan badan yang menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan, masih terindikasi kecurangan yang dilakukan oleh pejabat instansi tersebut.

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD memuat sejumlah temuan setiap temuan yang

ditemukan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. BPK selalu mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara dengan memantau tindak lanjut hasil temuan audit. Kualitas pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan akan meningkat jika tindak lanjut hasil temuan audit berjalan efektif. Peningkatan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menurut BPK disebabkan pemerintah daerah melakukan perbaikan-perbaikan kelemahan pada LKPD tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang tersaji dalam LKPD, terhadap opini audit BPK merupakan hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Pemerintah daerah masih memiliki permasalahan mengenai pengelolaan aset daerah, dana perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan belanja dalam mencapai target opini WTP. BPK juga masih menemukan bahwa pemerintah daerah kurang optimal dalam menindak lanjuti hasil temuan audit. BPK merekomendasikan kepada kepala daerah untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan di daerah. Karakteristik pemerintah daerah diwakili oleh kekayaan, ukuran, dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh terhadap pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Opini Audit".

2. KAJIAN PUSTAKA

Agency Theory

Pemerintah adalah sebuah organisasi yang besar dan kompleks, sebagai sebuah organisasi yang besar maka pemerintah harus dikelola dengan baik. Pengelolaan organisasi pemerintah sebagaimana organisasi sektor swasta dikelola oleh sekelompok orang yang diberi kepercayaan untuk mengelola organisasi. Pada sektor swasta para *stakeholder* yang disebut *principal* dan orang yang diberi kuasa disebut *agent*. Teori tersebut dikenal dengan *agency theory*.

Penelitian Ristu Pratiwi dan Yani

Aryani (2016) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan kontrak yang melibatkan satu atau lebih *principal* dengan *agent* untuk melaksanakan pekerjaan yang melibatkan sebagian pelimpahan wewenang dalam pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*. Pelimpahan sebagian wewenang dari *principal* kepada *agent* akan mengakibatkan *agent* tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan dari *principal* karena *agent* mempunyai kepentingan sendiri.

Agency theory bertujuan untuk mempelajari pemecahan permasalahan dalam hubungan keagenan. Permasalahan tersebut terdiri dari dua masalah pokok, yaitu (1) ada konflik tujuan dari *principal* dan *agents* dan (2) terlalu sulit atau mahal bagi *principal* untuk mengetahui yang dilakukan oleh *agent*. Permasalahan kedua adalah permasalahan *risk sharing* yang timbul ketika *principal* dan *agent* terdapat perbedaan tindakan dalam menyikapi resiko.

Sistem desentralisasi yang dimulai tahun 1999 yang ditandai dengan adanya penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Halim dan Abdullah (2006) dalam Ristu Pratiwi dan Yani Aryani (2016) dalam otonomi daerah terdapat hubungan keagenan antara legislatif dan eksekutif dalam bidang akuntansi mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pertanggung jawaban. Eksekutif berlaku sebagai *dual agent* dari dua *principal* legislatif dan rakyat.

Eksekutif yaitu kepala daerah mempunyai informasi keuangan daerah yang lebih banyak daripada legislatif dan rakyat. Legislatif menilai pertanggung jawaban keuangan daerah setiap tahun anggaran. Laporan keuangan tersebut harus terlebih dahulu diperiksa oleh pihak yang independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengetahui kualitas dari laporan keuangan yang disampaikan.

Karakteristik Pemerintah Daerah

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2020), karakteristik berarti mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. mendefinisikan karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada pemerintah daerah, menandai sebuah daerah, dan membedakannya dengan daerah lain.

Sumarjo (dalam Ristu Pratiwi dan Yani Aryani, 2016) menemukan bahwa terdapat pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kinerja suatu perusahaan. Hal tersebut dapat diterapkan pada sektor publik, yang mana karakteristik daerah dapat menjadi prediktor yang baik dalam mengukur kinerja pemerintah daerah. Karakteristik pemerintah daerah diwakili oleh kekayaan, ukuran, dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat berdasarkan Dengan demikian, perbedaan karakteristik antar daerah satu dengan daerah lainnya diasumsikan dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

(Ristu Pratiwi dan Yani Aryani, 2016) meneliti tentang karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan ukuran (*size*) Pemda yang diproksikan dengan total aset, kemakmuran (*wealth*) yang diproksikan dengan PAD, ukuran legislatif yang diproksikan dengan jumlah total anggota DPRD, *leverage* yang diproksikan dengan *debt to equity* dan *inter governmental revenue* di proksikan dengan perbandingan antara jumlah total dana perimbangan dengan jumlah total pendapatan sebagai variabel independen.

Mustikarini dan Fitriyasi (dalam Ristu Pratiwi dan Yani Aryani, 2016) meneliti tentang karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan ukuran (*size*) pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset, tingkat kekayaan daerah yang diproksikan dengan PAD, tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang diproksikan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan belanja daerah. Suhardjanto dan Yulianingtyas (2010) menggunakan *size*, jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan status daerah sebagai proksi dari karakteristik pemerintah daerah.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penelitian ini menjelaskan karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan ukuran (*size*) pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset, tingkat kekayaan daerah yang diproksikan dengan PAD, tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang diproksikan dengan DAU dan belanja daerah.

Ukuran Pemerintah Daerah

Ristu Pratiwi dan Yani Aryani (2016) menggunakan menjelaskan karakteristik

pemerintah daerah dengan menggunakan ukuran (*size*) pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset.

Ukuran yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Selain itu kemudahan di bidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh PAD guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja (Kusumawardani, 2012). Hal tersebut menyatakan bahwa semakin besar ukuran (*size*) pemerintah daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

Pemerintah daerah yang memiliki aset yang besar memiliki tekanan yang besar pula untuk melakukan pengungkapan kinerja keuangan. Pemerintah daerah dalam melakukan pengungkapan atas laporan kerjanya akan lebih terdorong untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat *good news*. *Good news* tersebut dapat berupa laporan mengenai baiknya kinerja pemerintah daerah tersebut sehingga meningkatkan skor kerjanya.

Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah

Pada penelitian Ristu Pratiwi dan Yani Aryani (2016), tingkat ketergantungan dengan pusat dinyatakan dengan besarnya DAU. Menurut PP No.55 tahun 2005, DAU adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lainnya.

Penggunaan DAU ditetapkan oleh daerah. Penggunaan DAU dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.

DAU bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Adapun cara menghitung DAU menurut UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan PP No.33/2005 tentang Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

- a. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. DAU untuk daerah propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari DAU sebagaimana ditetapkan diatas.
- c. DAU untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah DAU untuk daerah/kabupaten yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- d. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

DAU dialokasikan untuk daerah propinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) *Netto* yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah

Kekayaan (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah PAD (Sumarjo, 2010). Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004, PAD merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. PAD terdiri dari pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Juliawati, *et al*, (2012) dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui PAD. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar.

PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Oleh karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Disamping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya (Juliawati, *et al*, 2012). Dengan lancarnya penyelenggaraan urusan daerah maka pemerintah daerah akan memiliki kinerja yang baik dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Tingkat Belanja Pemerintah Daerah

Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dituangkan dalam kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Jumlah belanja yang besar pada pemerintah daerah mengindikasikan kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah juga besar dan kompleks. Sistem pengendalian terhadap belanja harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar *outcome* dapat tercapai sebagaimana prinsip penyusunan anggaran berdasarkan kinerja. Namun, jika pemerintah daerah tidak berhati-hati dalam penatausahaan pengelolaan belanja maka akan terjadi banyak penyimpangan.

Pada saat ini belanja pemerintah daerah masih ditemukan banyak penyimpangan.

Menurut Behn dkk (2010), belanja berpengaruh positif pada tingkat pengungkapan laporan keuangan organisasi nirlaba. Belanja pemerintah terbukti berpengaruh positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah (Marfiana dan Kurniasih, 2013). Menurut Nurdiono (2014) besarnya anggaran belanja publik berdampak pada opini BPK.

Pemerintah daerah dengan realisasi anggaran belanja yang besar pada umumnya mempunyai kompleksitas kegiatan yang besar pula. Anggaran belanja yang besar pada umumnya terdiri dari kegiatan yang banyak oleh karena itu dibutuhkan pengendalian yang memadai. Belanja pemerintah daerah yang besar jika tidak dikelola dengan hati-hati akan menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi akan mempengaruhi auditor dalam memberikan opini.

Opini Audit

Audit adalah “suatu proses sistematis dan objektif dari penyediaan dan evaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan pernyataan (assertion) tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna memastikan derajat kesesuaian atau tingkat hubungan antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang ada serta menyampaikan hasil yang diperoleh tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan” (Arens, 2008).

Opini audit merupakan hasil dari proses audit dan salah satu faktor yang dapat menggambarkan kualitas audit (Wibowo dan Rossieta, 2009). Hal serupa juga dinyatakan dalam Setyowati (2013) yang berpendapat bahwa kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat diketahui dari opini audit, sehingga opini audit pemerintah daerah digunakan sebagai pertimbangan oleh pemerintah pusat dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Opini audit merupakan pernyataan auditor atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, sehingga opini audit dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan dan memberikan keyakinan bahwa informasi keuangan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam UU No.15 tahun 2004 pasal 1 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa “pemeriksa adalah orang yang melakukan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK”. BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana hasil pemeriksaan keuangan berupa pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang disajikan didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*)
- c. Kejujuran untuk/ dalam menjelaskan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- d. Efektivitas sistem pengendalian internal

Pada dasarnya terdapat dua kondisi menentukan opini yaitu pembatasan lingkup audit atau kecukupan bukti (*audit evidence*) dan penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji serta materialitas. Materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji dilihat dari keadaan yang melingkupinya yang mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan pada informasi tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI memberikan empat jenis opini, yaitu:

Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP (*Unqualified Opinion*)

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah daerah tersebut dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik,

dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Pendapat Wajar Dengan Pengecualian atau WDP (*Qualified Opinion*)

Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat tidak wajar adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan pemerintah daerah diragukan kewajarannya, sehingga bias menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Adalah pendapat yang menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti pemeriksaan/audit tidak cukup untuk membuat kesimpulan. Opini ini bias diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh pemerintah daerah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bias memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bias menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

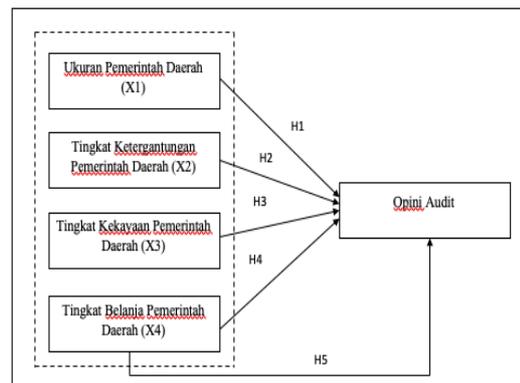
3. METODE PENELITIAN

Kerangka Pemikiran

(Nuraeni dan Martani , 2012) menyatakan bahwa organisasi dengan aset yang besar mempunyai system pengendalian intern yang kuat. (Mustikarini dan Fitriasaki 2012; Martani dan Lestiani 2012; Robin dan Austin 1986) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat

maka pemerintah daerah akan lebih mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berpengaruh pada hasil opini audit.

Pendapatan asli daerah yang besar mencerminkan bahwa pemerintah dituntut untuk mempertanggung jawabkan dan mengungkapkan PAD oleh para *stakeholder* khususnya penyumbang pendapatan. Selain itu, pemerintah daerah dapat memperkecil potensi-potensi kehilangan pendapatan yang menyebabkan kerugian Negara memperkecil potensi-potensi kehilangan pendapatan yang menyebabkan kerugian Negara dan semakin baiknya opini yang di berikan BPK. Begitu pula Belanja pemerintah yang besar mencerminkan kegiatan yang kompleks dan rumit dan jika sistem pengendalian intern pengelolaan belanja tidak optimal maka akan terjadi banyaknya penyimpangan belanja yang berpengaruh terhadap opini audit .Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian yang sudah ada, maka penulis akan mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut :



Sumber : Bukan data diolah, 2020

Gambar 3.1

Skema Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 2.1, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis kekuatan hubungan X1, X2, X3, dan X4 terhadap Y secara parsial maupun simultan.

Tempat dan waktu Penelitian

Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Ukuran pemerintah daerah, Tingkat ketergantungan pemerintah daerah, Tingkat kekayaan pemerintah daerah, Tingkat belanja pemerintah daerah terhadap Opini Audit”, maka peneliti melakukan penelitian di 34 Provinsi yang ada di

Indoneisa untuk periode 2008 - 2018.

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2020. Tahun data yang diteliti selama 10 tahun, mulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2018.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan setting. Berdasarkan sumbernya, penelitian ini menggunakan data sekunder. Menurut Sanusi (2016) “data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Terkait dengan data sekunder peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya”. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi (berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip). Data-data dalam penelitian ini diperoleh dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2008 – 2018 yang didapat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK).

Populasi

Populasi, yaitu seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan (Sanusi, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah LKPD mengenai karakteristik pemerintah daerah dan opini audit 34 Provinsi di Indonesia yang dijadikan sebagai objek penelitian.

Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2018). Teknik dalam pengambilan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai tujuan penelitian. Metode *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan atau kriteria tertentu (Sugiyono, 2018). Purposive sampling lebih tepat digunakan oleh peneliti apabila memang sebuah penelitian memerlukan kriteria khusus agar sampel yang diambil nantinya sesuai dengan tujuan penelitian dapat memecahkan permasalahan penelitian serta dapat memberikan nilai yang lebih representatif. Sehingga teknik yang diambil dapat memenuhi tujuan sebenarnya dilakukan penelitian. Pada penelitian ini menggunakan sampel Pemda Provinsi di Indonesia untuk

tahun anggaran 2008-2018 yang telah diaudit oleh BPK RI dan memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Kriteria-kriteria atas sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Pemda (LKPD) Provinsi pada tahun 2008-2018 yang telah diaudit oleh BPK.
2. Memiliki data yang lengkap untuk pengukuran keseluruhan variabel:
 - A. Menyediakan komponen LKPD, yaitu Laporan Realisasi Anggaran
 - B. Menyediakan komponen LKPD, yaitu Neraca
 - C. Menyediakan komponen LKPD, yaitu Laporan Arus Kas
 - D. Menyediakan komponen LKPD, yaitu Catatan atas Laporan Keuangan.
 - E. Menyediakan data opini audit pada LKPD / Laporan Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan kriteria-kriteria pemilihan sampel diatas, maka sampel yang terpilih dan digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 176 Laporan Keuangan Pemda Provinsi yang terdapat pada 16 Provinsi di Indonesia. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data adalah mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya. Data yang dikumpulkan tersebut ditentukan oleh masalah penelitian yang sekaligus mencerminkan karakteristik tujuan studi apakah untuk eksplorasi, deskripsi, atau menguji hipotesis (Sanusi, 2016). Dalam penelitian kualitatif ini bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan Hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah Hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik teriangularisasi, ternyata Hipotesis diterima, maka Hipotesis tersebut berkembang menjadi teori. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik dan regresi ordinal dengan menggunakan alat bantu program *spss* dan *Excel*.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi (*standard deviation*), dan maksimum minimum. Mean digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai dispersi rata-rata dari sampel. Maksimum-minimum digunakan untuk melihat nilai maksimum dan minimum dari populasi (Ghozali, 2013). Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian.

Binomial Logistic Regression.

Regresi logistik adalah sebuah pendekatan untuk membuat model prediksi seperti halnya regresi linier atau yang biasa disebut dengan istilah *Ordinary Least Squares (OLS) regression*. Perbedaannya adalah pada regresi logistik, peneliti memprediksi variabel terikat yang berskala dikotomi (dummy). Skala dikotomi yang dimaksud adalah skala data nominal dengan dua kategori, misalnya: Ya dan Tidak, Baik dan Buruk atau Tinggi dan Rendah. Apabila pada OLS mewajibkan syarat atau asumsi bahwa *error varians (residual)* terdistribusi secara normal. Sebaliknya, pada regresi ini tidak dibutuhkan asumsi tersebut sebab pada regresi jenis logistik ini mengikuti distribusi logistik. Skala dikotomi pada uji ini adalah WTP (1) dan WDP, TW, TMP (0).

Uji -2 Log Likelihood (-2LogL)

Uji *likelihood* untuk melihat penambahan variabel independen yaitu Ukuran pemerintah daerah, Tingkat ketergantungan pemerintah daerah, Tingkat kekayaan pemerintah daerah, dan Tingkat belanja pemerintah daerah ke dalam model penelitian apakah dapat memperbaiki model *fit* ke dalam model penelitian. Dengan nilai :

- $-2 \text{ Log Likelihood} < \chi^2$ tabel sehingga menerima H_0 .
- $-2 \text{ Log Likelihood} > \chi^2$ tabel sehingga menolak H_0 .

Uji Nilai Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test

nilai *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* adalah Untuk mengetahui apakah model dapat digunakan untuk memprediksi observasi dalam penelitian . Dengan nilai :

- nilai signifikansi $> 0,05$ sehingga model dapat diterima.
- nilai signifikansi $< 0,05$ sehingga model tidak dapat diterima.

Uji Nagelkerke R^2

Nagelkerke R^2 adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui besaran variabel independen yang dapat dijelaskan oleh variabel dependen.

Uji omnibus test

omnibus test adalah Uji untuk menunjukan bahwa penambahan variabel independen dapat memberikan pengaruh nyata terhadap model , atau dengan kata lain model di nyatakan *fit* . Dengan nilai :

- nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 dapat di terima.
- nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 tidak dapat di terima.

Uji Estimasi Parameter

Uji ini dapat dilihat dari tampilan *output variable inequation*. Untuk mengetahui Variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen pada level signifikan

- ***signifikan pada level $\alpha = 1 \%$
- ** signifikan pada level $\alpha = 5 \%$
- *signifikan pada level $\alpha = 10 \%$

maka persamaan penelitian adalah sebagai berikut :

$$Y = \text{Constant} + B (X_1) + B (X_2) + B (X_3) + B (X_4) .$$

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah daerah, dan tingkat belanja pemerintah daerah, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah opini audit. Hasil uji statistik deskriptif terhadap variabel independen dan variabel dependen dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance	Skewness	Kurtosis			
		Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic		
UKURAN DAERAH	176	5,67	25,65	31,32	5245,53	29,8042	,06017	,79027	,637	-1,093	,183	4,982	,364
TINGKAT KETEGANTUNGAN	176	81,86	4,51	86,37	4894,70	27,8108	1,37373	18,22456	332,135	1,163	,183	1,242	,364
TINGKAT KEKAYAAN	176	5,47	25,13	30,60	4913,44	27,9173	,08016	1,16963	1,368	,579	,183	-,104	,364
TINGKAT BELANJA	176	3,75	27,04	30,79	5115,12	29,0632	,05712	,75775	,574	,091	,183	-,356	,364
OPINI AUDIT	176	3	1	4	563	3,20	,076	1,014	1,029	-1,007	,183	-,233	,364
Valid N (listwise)	176												

Sumber : Output SPSS version 23

Tabel 4.1 di atas memberikan penjelasan mengenai statistik deskriptif dari setiap variabel penelitian. Jumlah sampel laporan keuangan pemerintah daerah audited di Provinsi Indonesia yang diteliti adalah sebanyak 176 laporan realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah. Variabel independen ukuran daerah memiliki nilai terendah sebesar 25,65, nilai tertinggi sebesar 31,32, nilai rata-rata sebesar 29,8042, dan standar deviasi sebesar 0,79821. Variabel independen tingkat ketegantungan pemerintah daerah memiliki nilai terendah sebesar 4,51, nilai tertinggi sebesar 86,37, nilai rata-rata sebesar 27,8108, dan standar deviasi sebesar 1,37373. Variabel independen tingkat kekayaan pemerintah daerah memiliki nilai terendah sebesar 25,13, nilai tertinggi sebesar 30,60, nilai rata-rata sebesar 27,9173, dan standar deviasi sebesar 1,16963. Variabel independen tingkat belanja pemerintah daerah memiliki nilai terendah sebesar 27,04, nilai tertinggi sebesar 30,79, nilai rata-rata sebesar 29,0632, dan standar deviasi sebesar 0,75775. Variabel dependen opini audit memiliki nilai terendah sebesar 1, nilai tertinggi sebesar 4, nilai rata-rata sebesar 3,20, dan standar deviasi sebesar 1,014.

Binomial Logistic Regression.

Uji -2 Log Likelihood (-2LogL).

Tabel 4.2

Hasil Uji -2 Log Likelihood (-2LogL)

Iteration History^{a,b,c,d}

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients					
		Constant	X1	X2	X3	X4	
Step 1	1	200,593	-47,915	,535	,035	,300	,783
	2	197,571	-64,888	,763	,047	,412	1,016
	3	197,481	-68,346	,812	,049	,440	1,056
	4	197,481	-68,470	,813	,049	,441	1,057
	5	197,481	-68,470	,813	,049	,441	1,057

Sumber : Output SPSS SPSS version 23

Uji -2 Log Likelihood (-2LogL). Uji likelihood dalam penelitian ini diperoleh nilai

-2LogL adalah sebesar 197.481. Yang menyatakan bahwa nilai 2 Log Likelihood sebesar 197,481 < dari Tabel chi square sebesar 202,513. Hal ini berarti Ho diterima atau penambahan variabel independen yaitu Ukuran pemerintah daerah, Tingkat ketegantungan pemerintah daerah, Tingkat kekayaan pemerintah daerah, dan Tingkat belanja pemerintah daerah ke dalam model penelitian dapat memperbaiki model fit.

Uji Nilai Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test.

Tabel 4.3

Hasil Uji Nilai Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	3.196	8	.921

Sumber : Output SPSS SPSS version 23

Hasil penelitian ini nilai Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test adalah 0,921 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga model baik atau dapat diterima. Dengan demikian, maka model dapat digunakan untuk memprediksi observasi dalam penelitian.

4.1.2.3. Uji Nagelkerke R²

Tabel 4.4

Hasil Uji Nagelkerke R²

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	197,481 ^a	,229	,305

Sumber : Output SPSS SPSS version 23

Uji Nagelkerke R². Pada penelitian ini nilai Nagelkerke R² adalah sebesar 0,305 yang berarti bahwa variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel dependen adalah 30,5% sedangkan sisanya 69,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar penelitian.

Uji omnibus test

Tabel 4.5

Hasil Uji omnibus test

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	45.688	4	.000
	Block	45.688	4	.000
	Model	45.688	4	.000

Sumber : Output SPSS SPSS version 23

Hasil uji omnibus test pada penelitian ini adalah sebesar 0,000 yang untuk menunjukan bahwa penambahan variable independen dapat memberikan pengaruh nyata terhadap model, atau dengan kata lain model di nyatakan fit. Hasil uji ini juga menjelaskan bahwa ada pengaruh signifikan secara simultan ukuran pemerintah daerah (X1), tingkat ketergantungan pemerintah daerah (X2), tingkat kekayaan pemerintah daerah (X3), dan tingkat belanja pemerintah daerah (X4) terhadap opini audit (Y) oleh karena nilai sig sebesar 0,000 < dari 0,05.

Uji Estimasi Parameter.

Uji Estimasi Parameter. Uji ini dapat dilihat dari tampilan *output variable inequation*.

Tabel 4.6
Hasil Uji Estimasi Parameter

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step 1 ^a X1	.813	.347	5.492	1	.019	2.256	1.142	4.454
X2	.049	.015	10.159	1	.001	1.051	1.019	1.083
X3	.441	.214	4.259	1	.039	1.555	1.022	2.364
X4	1.057	.472	5.024	1	.025	2.878	1.142	7.251
Constant	-68.470	13.690	25.013	1	.000	.000		

Sumber : Output SPSS SPSS version 23

***signifikan pada level $\alpha = 1\%$

** signifikan pada level $\alpha = 5\%$

* signifikan pada level $\alpha = 10\%$

Berdasarkan hasil di atas maka diperoleh persamaan sebagai berikut ini.

$$\text{Opini} = -68.470 + 0,831 (X1) + 0,049 (X2) + 0,441 (X3) + 1.057 (X4)$$

Variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen pada level signifikan 1% adalah variabel tingkat ketergantungan pemerintah daerah (X2). Variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen pada level signifikan 5% adalah (X1) ukuran pemerintah daerah (X3) tingkat kekayaan pemerintah daerah (X4). signifikan serta mempunyai mempunyai

koefisien positif sehingga H1, H2, H3, H4 dapat diterima.

1. Variabel ukuran pemerintah daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,019. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,019 < 0,05$), sehingga dapat dikatakan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap variabel opini audit. Maka dapat diketahui bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya dapat disimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap opini audit.

2. Variabel tingkat ketergantungan pemerintah daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$), sehingga dapat dikatakan bahwa variabel tingkat ketergantungan pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap variabel opini audit. Maka dapat diketahui bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap opini audit.

3. Variabel tingkat kekayaan pemerintah daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,039. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,039 < 0,05$), sehingga dapat dikatakan bahwa variabel tingkat kekayaan pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap variabel opini audit. Maka dapat diketahui bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya dapat disimpulkan bahwa tingkat kekayaan pemerintah daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap opini audit.

4. Variabel tingkat belanja pemerintah daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,025. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,025 < 0,05$), sehingga dapat dikatakan bahwa variabel tingkat belanja pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap variabel opini audit. Maka dapat diketahui H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya dapat disimpulkan bahwa tingkat belanja pemerintah daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap opini audit.

Pembahasan

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah

terhadap Opini Audit.

Pada pengujian *binomial regresi logistik* ukuran pemerintah daerah mempunyai nilai signifikansi 0,019 dan berkorelasi positif sehingga H1 dapat diterima. Hal ini berarti semakin besar nilai aset yang dimiliki pemerintah daerah kemungkinan akan mendapatkan opini yang lebih baik atau WTP. Penelitian ini mendukung penelitian DeAngelo (1981); Deis dan Giroux (1992); Setyaningrum (2012) bahwa pemerintah daerah yang mempunyai aset besar akan menyajikan laporan keuangan yang jauh dari salah saji. Aset yang besar merupakan sumber daya yang baik dalam menjalankan organisasi. Menurut Doyle dkk. (2005); Petrovits dkk. (2011); dan Zaelani (2010), Nuraeni dan Martani (2012) menyatakan bahwa organisasi dengan aset yang besar mempunyai sistem pengendalian intern yang kuat. Sistem pengendalian intern yang kuat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan reliabel sehingga opini audit akan menjadi lebih baik.

Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Opini Audit.

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah mempunyai nilai signifikansi 0,001 dan mempunyai koefisien positif pada pengujian *binomial logistic regression*. Oleh karena itu, H2 diterima. Penelitian ini berhasil mendukung penelitian (Susbiyani dkk. 2014; Mustikarini dan Fitriyani 2012; Martani dan Lestiani 2012; Robin dan Austin 1986) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka pemerintah daerah akan lebih mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah pusat terhadap dana-dana yang diberikan kepada pemerintah daerah di monitoring dan dievaluasi dengan memadai. Ketaatan pemerintah daerah akan berpengaruh pada opini audit.

Pengaruh Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah terhadap Opini Audit.

Tingkat kekayaan pemerintah daerah mempunyai tingkat signifikan sebesar 0,039 yang berarti di bawah 0,05 dan mempunyai korelasi positif sehingga H3 dalam penelitian ini dapat diterima. Hal ini berarti bahwa semakin besar pendapatan maka semakin tinggi pengendalian yang dibutuhkan. Meningkatnya pengendalian

maka akan berdampak pada ketaatan terhadap peraturan yang berlaku dan pada akhirnya akan memperoleh opini yang baik. Hasil ini mendukung penelitian yang menyatakan bahwa kekayaan pemerintah daerah mempunyai pengaruh positif pada pengungkapan LKPD (Laswad dkk., 2005; Setyaningrum dan Syafitri, 2012) kinerja pemerintah daerah (Mustikarini dan Fitriyani, 2012). Pendapatan Asli Daerah yang besar mencerminkan bahwa pemerintah dituntut untuk mempertanggung jawabkan dan mengungkapkan PAD oleh para *stakeholder* khususnya penyumbang pendapatan. Selain itu, pemerintah daerah dapat memperkecil potensi-potensi kehilangan pendapatan yang menyebabkan kerugian negara.

Pengaruh Tingkat Belanja Pemerintah Daerah terhadap Opini Audit.

Variabel belanja pada uji *binomial logistic regression* mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,025 dan berkorelasi positif maka H4 dalam penelitian ini dapat diterima. Penelitian ini mendukung penelitian yang menyatakan bahwa belanja berpengaruh terhadap opini audit (Nurdiono, 2014) dan kinerja pemerintah daerah (Mustikarini dan Fitriyani, 2012). Belanja pemerintah yang besar mencerminkan kegiatan yang kompleks dan rumit dan jika sistem pengendalian intern pengelolaan belanja tidak optimal maka akan terjadi banyaknya penyimpangan belanja, sehingga dibutuhkan pengendalian yang baik. Pengendalian yang baik ini akan mendapatkan opini yang baik.

Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Opini Audit.

Dalam uji *Binomial Logistic Regression* Hasil uji *omnibus test* menjelaskan bahwa ada pengaruh signifikan secara simultan ukuran pemerintah daerah (X1), tingkat ketergantungan pemerintah daerah (X2), tingkat kekayaan pemerintah daerah (X3), dan tingkat belanja pemerintah daerah (X4) terhadap opini audit (Y) oleh karena nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$. Penelitian ini berhasil mendukung penelitian yang dilakukan oleh Martani dan Lestiani, (2012). Yang menyatakan bahwa Karakteristik pemerintah daerah berhubungan dengan kualitas informasi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Dana alokasi umum, Pendapatan asli daerah, Belanja adalah merupakan bagian dari APBN. Mulai dari penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggung

jawaban APBD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin besar DAU, PAD, dan Belanja maka semakin rumit pertanggung jawaban APBD tersebut. Dengan tingkat kompleksitas pengelolaan APBD maka di perlukan pengawasan yang baik dan juga perlu aturan-aturan yang perlu di susun sehingga tidak terjadi kecurangan-kecurangan atau hal hal yang *negative* dari pengelolaan sampai dengan pertanggung jawaban APBD. Oleh karena itu semakin besarnya DAU, PAD, dan Belanja diikuti semakin tinggi tingkat pengawasan dan peraturan maka akan berpengaruh terhadap opini audit.

Semakin besar aset daerah berarti baik pengelolaan secara administratif dan pengawasan secara fisik semakin tinggi. Semakin baik dan tingginya pengawasan fisik dan administratif daripada aset maka berpengaruh terhadap pengendalian intren secara keseluruhan. Pengendalian intren yang baik secara keseluruhan dari pemerintah akan berpengaruh terhadap opini yang di berikan oleh BPK.

5. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pengujian data dan analisis hasil pengujian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengujian *binomial logistic regression* Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Opini audit.
2. Berdasarkan hasil pengujian *binomial logistic regression* Tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Opini audit.
3. Berdasarkan hasil pengujian *binomial logistic regression* Tingkat kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Opini audit.
4. Berdasarkan hasil pengujian *binomial logistic regression* Tingkat belanja pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Opini audit.
5. Berdasarkan hasil pengujian *omnibus test* Ukuran pemerintah daerah, Tingkat ketergantungan pemerintah daerah, Tingkat kekayaan pemerintah daerah, dan Tingkat belanja pemerintah daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Opini audit.

6. REFERENSI

- Arens, et.al. (2015). *Auditing & Jasa Assurance: Pendekatan Terintegrasi*, Edisi Kelima belas Jilid1. Jakarta: Erlangga2012. *Auditing and Assurance Service: an Integrated Approach*, 14th Edition. United States of America: Pearson.
- Behn, B. K., J. V. Carcello., D. R. Hermanson., & R. H. Hermanson. (1997). "The Determinants of Audit Client Satisfaction among Clients of Big 6 Firms." *Accounting Horizons*, (March): vol. 11. No. (1), 7-24.
- De Angelo, L.E. (1981) "Auditor Size and Audit Quality". *Journal of Accounting and Economics* 3: 183-199.
- Doyle, J.T., Weili, G., & Sarah McVay, (2005) *Determinants of Weaknesses in Internal Control over Financial Reporting*. School Conference at Columbia University AAA Midwest Regional Meeting.
- Halim, A. & Abdullah, S. (2006) "Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi". *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64.
- Juliawati et al.,. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*.
- Kusumawardani. (2012). Pengaruh size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Indonesia Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
- Laswad, F., R. Fisher., & P. Oyelere.(2005) "Determinant of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities". *Journal of Accounting and Public Policy* 24:101-121.
- Liestiani,A.(2008).*Pengungkapan Laporan Keuangan Pemda Kabupaten / Kota di Indonesia Untuk Tahun Anggaran 2006*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,Depok.
- Marfiana, N., & Kurniasih, L. (2013)

- “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”. *Journal & Proceeding FEB Unsoed* 3(1).
- Martani, D. & Lestiani, A. (2012) “Disclousure in Local Government Financial Statement: the Case of Indonesia”. *Global Review of Accounting and Finance* 3(1): 67-84.
- Mustikarini, W., A., & Fitriasari, D. (2012) “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007”. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.
- Nuraeni & Martani, D. (2012) *The Impact Of Local Governments Characteristics toward Their Audit Quality for Financial Reports of 2008-2009*, 3rd International Conference on Business And Economic Research (3rd ICBER 2012).
- Nurdiono. (2015) . Analisis Hasil Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Disertasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
- Olken, Benjamin A. (2007) Monitoring Corruption: Evidence from a Field Experiment in Indonesia. The University Of Chicago
- Petrovits, C., C. Shakespeare., & A. Shih. (2011) The Causes and Consequences of Internal Control Problems in Nonprofit Organizations. *The Accounting Review* 86 (1):325-357.
- Pratiwi, R., & Aryani, Y. A. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Opini. *Jurnal Akuntansi*, 20(2), 167. <https://doi.org/10.24912/ja.v20i2.52>
- Priharjanto, A., & Wardani, Y. Y. (2017). Pengaruh Temuan, Tingkat Penyimpangan, Opini Audit, Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Info Artha*, 1, 97–110. <https://doi.org/10.31092/jia.v1i1.72>
- Robbins, W.A. & Austin, K.R. (1986) Determinant Quality in Governmental Financial Reports: An Assessment of the Appropriateness of a Compound Measure. *Journal of Accounting Research* 24 (2): 412-421.
- Rosadi, S., Siyamto, Y., & Aisyiah, H. N. (2017). Pengaruh Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan, Status Daerah Dan Ukuran Daerah Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa Tahun 2013. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(2), 99. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i2.103>
- Safitri, N. L. K. S. A. (2014). *Internal Dan Temuan Kepatuhan Terhadap Opini Audit Pada Pemerintah Daerah*.
- Setyaningrum, D. (2012) *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit BPK-RI*. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154–170. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.10>
- Setyawati, H. (2013). Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Dan Orientasi Pasar Terhadap Kinerja Perusahaan Melalui Keunggulan Bersaing Dan Persepsi Ketidak pastian lingkungan Sebagai Variabel Moderasi (Survey pada UMKM Perdagangan di Kabupaten Kebumen). *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2).
- Suhardjanto, D. & Lesmana, S. I. (2010) Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia. *Prestasi* 3(2): 25-40
- Suhardjanto, D., Rusmin, Mandasari, & P., Brown, A. (2010). *Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristics: Evidence from Indonesian Municipalities*. Penelitian Hibah Publikasi Internasional, LP2M UNS.

- Suhardjanto, D. & Yulianingtyas, R. R. (2011) "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten / Kota di Indonesia)". *Jurnal Akuntansi dan Auditing Volume 8(1)*: 30-42.
- Sumardjo, H. (2010) *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Skripsi. FEB Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta
- Susbiyani, A., B. Subroto, Sutrisno., & B. Purnomosidhi. (2014) "The compliance with Mandatory Disclosure of Financial Statement: A Study from Local Government in Indonesia". *Research Journal of Finance and Accounting 5(10)*: 124-130
- Wibowo, A, & Rossieta, H. (2009). Faktor-faktor Determenasi Kualitas Audit-Suatu Studi Dengan Pendekatan Earning Surprise Benchmark.Pascasarjana Ilmu Akuntansi FEUI.